

Review Harvest Strategy Penyusunan HCR Rajungan

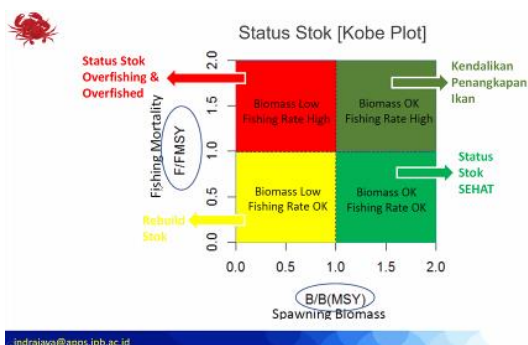
Hari / Tanggal : Rabu – Jumat / 20 – 22 Oktober 2021
 Waktu : 08.00 – 16.00
 Tempat : Zoom Cloud Meeting

PEMBUKAAN

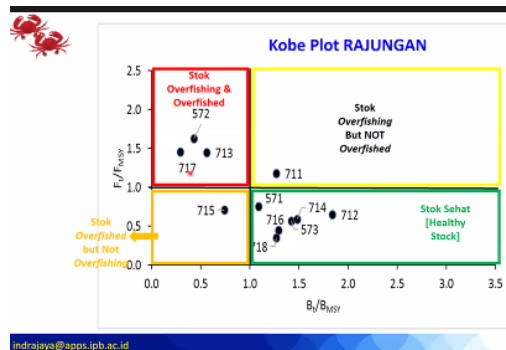
Rapat dibuka oleh ibu Besweni pembahasan rapat kali ini mengenai perikanan terukur dan membahas penyusunan HCR rajungan.

Prof Indra Jaya

Tolak ukur penangkapan (C/E)



Tolak ukur biologi mengacu pada permen nomor 20 tahun 2021 yang didalamnya mandate komnaskajiskan berubah menjadi memberikan rekomendasi mengenai ukuran atau berat minimum. Status rajungan Indonesia. Pengkajian Stok Rajungan 2021 menggunakan sumber data dan motede analisis. Kobe Plot rajungan. Rekomendasi komnaskajiskan untuk HCR: Terus perkuat pendataan (akurasi dan liputan (coverage)) perikanan rajungan dalam rangka menjamin keberlanjutan stok rajungan. Data/indikator yang penting diketahui dari waktu ke waktu pada perikanan rajungan adalah rata-rata hasil tangkapan, upaya penangkapan, indeks kelimpahan (CPUE), dan data biologi (ukuran, jenis kelamin, SPR). Akurasi data ini sangat penting untuk merumuskan HCR yang tepat dan efektif. HCR saat ini menjadi salah satu tools untuk pengelolaan perikanan yang cukup berhasil.





ASOSIASI PENGELOLAAN RAJUNGAN INDONESIA INDONESIAN BLUE SWIMMING CRAB ASSOCIATION

Hawis Madduppa

Ada terminologi yang belum masuk tabel seperti MSI, GTP dan yang lainnya. Menurut saya itu perlu disinkronkan. Mengenai alokasi perlu dilihat trend rajungan setiap tahunnya (2019-2021) dan perlu adanya penambahan data terkait hal tersebut.

Abdul Ghofar

Betul menurut pak Indra bahwa sebaik apapun model yang dilakukan akan sia-sia Ketika data input tidak baik. Saya lihat dilapangan kalua rajungan yang ada/didaratkan di Jawa Tengah atau Jawa Timur banyak juga yang berasal dari daerah luar bahkan import bahan baku dari luar. Karena rajungan ini adalah bisnis dimana tidak akan selalu mengikuti alur ilmiah, hal ini akan mempengaruhi data input yang ada. Dan ini menjadi tantangan dalam pengelolaan rajungan. Jadi kita harus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk membantu bersama-sama melakukan pendataan yang lebih baik.

Dr. Hawis Madduppa

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main content is a presentation slide with the following text:

ASOSIASI PENGELOLAAN RAJUNGAN INDONESIA
APRI

Departemen ITK
IPB University
Bojor Indonesia

DRAFT USULAN
Kaidah Pengendalian Pemanfaatan
(Harvest Control Rules)
Perikanan Rajungan di Indonesia

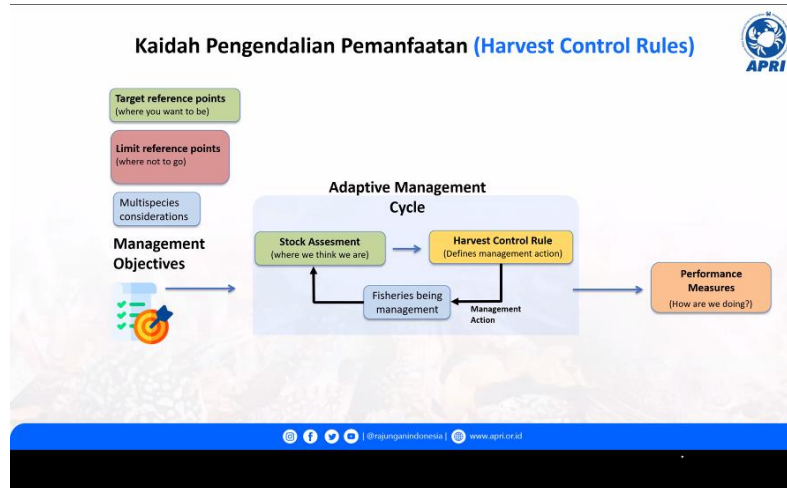
Dr. Hawis Madduppa
Executive Director
Asosiasi Pengelola Rajungan Indonesia (APRI)
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University
hawis@apps.ipb.ac.id

The Zoom interface includes a recording indicator, a participant list (55), chat, share screen, record, and reactions buttons. The system tray at the bottom shows the date as 21/10/2021 and the time as 9:40.

Perikanan terukur itu penting termasuk juga rajungan karena rajungan merupakan komoditas yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian. Volume dan nilai ekspor rajungan pertahun mencapai 10.000 – 20.000 ton/tahun daerah yang menjadi poros rajungan antara lain Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Utara. Kalau kita lihat dari data 2021 mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Jadi perikanan terukur ini sangat diperlukan untuk menunjang kenaikan tersebut. Rajungan di Indonesia perlu dikelola karena Indonesia menyumbang sampai 60% rajungan yang ada di Amerika dan mencapai 80% di Asia Tenggara. HCR Rajungan merupakan acuan dalam pengelolaan rajungan. Kondisi stok rajungan di Indonesia sudah berada diatas limit reference point untuk SPR nya. Status rajungan di Indonesia

telah mengalami perkembangan selama 2015 – 2020. Dan untuk aturan pemerintah mengenai larangan penangkapan rajungan dibawah 10cm, dari data APRI menunjukkan trend penurunan.

Kaidah Pengendalian Pemanfaatan (HCR), dasar dari HCR adalah titik acuan yang disepakati dalam HS, yaitu titik acuan sasaran dan titik acuan bebas. Penyusunan HCR melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk menyepakati strategi terbaik dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya dari aspek biologi, sosial, dan ekonomi. Dalam suatu penangkapan, kita juga perlu mempertimbangkan terkait *by-catch*.



Dalam Input-output control perlu adanya pembatasan untuk celah pelolosan yang belum ada aturan resminya. Dalam permen no 17 tahun 2021 sudah diatur untuk ukuran minimal rajungan yang boleh ditangkap tetapi untuk rajungan bertelur luar belum diatur.

Dr. Besweni

Ketika tadi SPR turun berarti nanti ada scenario yang harus kita siapkan dalam HCR. Saya kurang paham ketika terjadi penurunan disana ada angka-angka disitu, saya perlu penjelasan lebih lanjut.

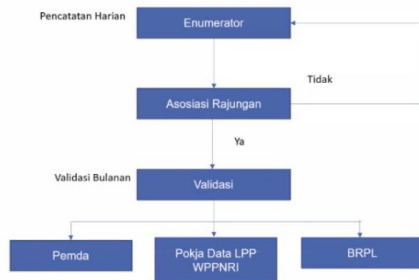
Dr. Hawis Madduppa

Untuk pendataan saya melihat dari HS yang sudah disepakati. Dari data itu adalah data yang akan digunakan untuk data rasio rajungan. Kemudian dari situ juga akan dihasilkan data SPR. Data-data akan dievaluasi 3 bulan sekali sehingga kita tahu langkah apa yang harus diambil kedepannya. Bahwa nilai HCR ini tidak berlaku secara keseluruhan karena setiap daerah akan berbeda-beda kondisinya. Sehingga peran daerah akan sangat penting, tetapi kita sudah punya acuan secara nasionalnya.

Dr. Besweni

Monitoring pendataan rajungan

FLOW CHART MONITORING PERIKANAN RAJUNGAN MELALUI CONTROL DOCUMENT



MONITORING PENDATAAN RAJUNGAN

Lokasi Monitoring	Penanggung Jawab (PIC)	Mitra Pendukung	Yang Dimonitor	Waktu Monitoring
Demak	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	SFP	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Pemalang	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Pati	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Rembang	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Lampung Timur	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	EDF, UNILA	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Tulang Bawang	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	EDF, UNILA	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Lampung Tengah	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	EDF, UNILA	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Pamekasan	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian
Sumenep	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	APRI	Ukuran dan Hasil Tangkapan di Landing Site (Sesuai dengan Form E-BRPL)	Harian

Monitoring rajungan ini menjadi sangat penting dalam ketersediaan data untuk HS dan SPR nantinya. Tiap provinsi nantinya bisa menambahkan lokasi-lokasi monitoring. Berikut acuan format data yang yang digunakan

LAPORAN PENDARATAN:

Nomor Batch : "XXXX"

Nama Pengepul/Stasiun Perebusan (Cooking Station) :

Lokasi Kolektor (Landing/Cooking Station) :

Tanggal :

No	Nama nelayan	Alat Tangkap	Daerah Penangkapan	Rajungan Yang Didaratkan (kilogram)						
				Total	Diterima	Ditolak			Trawl	
						< 10 cm	Bertelur Luar	Kualitas Buruk		

*Perubahan: masukan nama nelayan menjadi nama nelayan/nama kapal/nama pemilik

PEMDA Lampung

Untuk pendataan Lampung sudah bekerja sama dengan UNILA dan EDF sejak tahun 2019



ASOSIASI PENGELOLAAN RAJUNGAN INDONESIA INDONESIAN BLUE SWIMMING CRAB ASSOCIATION

Muhammad Khazali – EDF

Di tahun ini di Lampung kita akan menggunakan sistem baru dimana enumerator akan ditempatkan di KUB. Jadi nanti ada 2 form yang dibuat untuk keperluan stok dan aspek biologi. Rencananya akan dilakukan sampai 2023

Putuh Suadela

Terkait form ini masih belum ada nama kapal yang digunakan karena bisa jadi satu nelayan itu memiliki beberapa kapal dan akan agak berbeda jika nelayan yang menggunakan bubu, disini tidak ada keterangan jumlah bubu yang digunakan.

Saat ini EDF dibantu UNILA sedang mendesain sistem pendataan kedepannya, dan kita akan mendorong dimana nantinya di DKP ada orang khusus yang mengumpulkan data. Untuk pendanaan di tingkat desa, ada peraturan desa/dana desa dimana bisa digunakan untuk pendataan kebutuhan data sumberdaya desa.

Jensi Satin

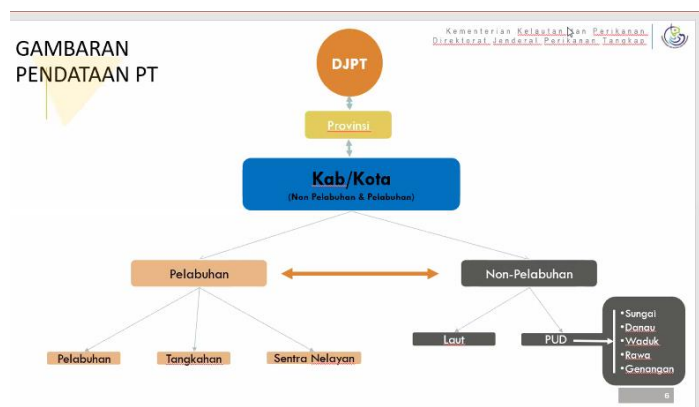
Praktek yang cukup efektif kalau dari pembelajaran proses perikanan lainnya, dilakukan validasi secara rutin dilead oleh rekan2 peneliti sebagai otoritas sains terkait dari BRPL/Puriskan. Sumber data berasal dari seluruh Asosiasi, maupun pengumpulan data oleh pemerintah dan berbagai stakeholder lainnya. Dalam proses validasi bias diidentifikasi kekurangan2 yang perlu difollow up bersama

Harlisa

Yang kita lakukan dari 2019 nama nelayan itu kita gunakan nama kapal, kalau nanti ada nelayan yang tidak memiliki nama kapal akan kita gunakan nama pemilik kapal.

Anang WS

Untuk data statistic perikanan tangkap dari tahun ke tahun sudah dilakukan melalui pendekatan dengan lingkup terkecil di tingkat kab/kota melalui Pelabuhan perikanan (PPP, PPI, PPN). Kemudian melalui pendekatan desa sampel, karena ada nelayan yang tidak mendaratkan di Pelabuhan perikanan. Kita ambil sampel berdasarkan jenis alat tangkap dan ukuran perahu. Gambaran pendataan:



Agus A Budhiman

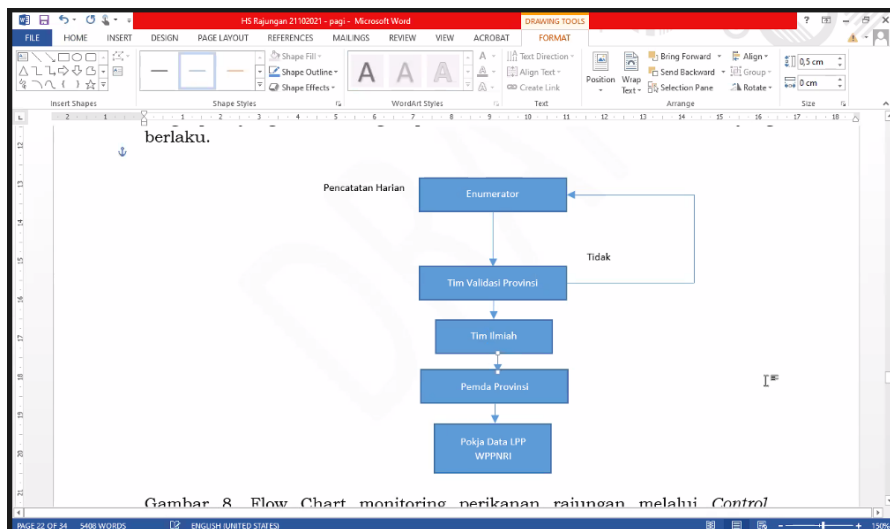
Bahwa sebetulnya kita punya pemain baru di rajungan yaitu forum NELANGSA. Barangkali kedepannya kami akan melatih mereka untuk melakukan pendataan di tingkat nelayan.

Hawis Madduppa

Kalau dilihat form ini lebih kepada form pendaratan, bukan untuk keperluan data biologis. Sementara untuk keperluan SPR form data biologis, dan formnya sudah disepakati dan sudah ada sejak tahun 2014.

Dr.Besweni

Perubahan pada flow chart monitoring perikanan rajungan.



Hawis Madduppa

Di APRI data yang dikumpulkan enumerator akan divalidasi 2 minggu sekali dan setiap 3 bulan akan disampaikan ke semua stakeholder. Nah menurut saya hal ini yang diperlukan sekarang ini. Jadi panel/tim ilmiah ini diubah dengan tim validasi.

Syahril Abdul (DJPT)

Data-data yang dikumpulkan oleh berbagai pihak perlu diintegrasikan.

Hawis Madduppa

Untuk di APRI semua data yang sudah diambil akan diupload di APRI Data Center.



ASOSIASI PENGELOLAAN RAJUNGAN INDONESIA

INDONESIAN BLUE SWIMMING CRAB ASSOCIATION

Dr. Besweni

Beberapa poin penting kesepakatan dalam pertemuan koordinasi nasional ini adalah:

1. Agar perikanan rajungan ini dapat dikelola secara terukur dan berkelanjutan maka diperlukan beberapa hal yaitu:
 - Dokumen HS yang dilengkapi dengan HCR berdasarkan ketersediaan data dan informasi terbaik yang tersedia saat ini
 - Sistem monitoring rajungan di WPPNRI khususnya terkait site lokasi, mekanisme monitoring, dan form pendataan rajungan untuk indikator biologi
 - Peran aktif dari semua stakeholder khususnya pemerintah daerah provinsi dalam memahami dokumen HS rajungan karena pemanfaatan sumberdaya perikanan rajungan berada pada wilayah kewenangan daerah.
2. Alat Penangkapan rajungan dominan di WPPNRI 712 adalah bubu dan jaring insang
3. Monitoring pendataan rajungan di WPPNRI 712 berada di 3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Tengah (Demak, Pamarang, Pati, dan Rembang), Lampung (Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Tengah), dan Jawa Timur (Pamekasan dan Sumenep), dan Jawa Barat.

Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah perlu dilakukan sosialisasi dokumen HS yang telah dilengkapi dengan HCR khususnya kepada pemerintahan daerah provinsi di WPPNRI 712 agar dapat bersama-sama memahami dan mengimplementasikannya dengan baik.